



**H. BAMBANG PUJIONO, SH.
BUPATI GROBOGAN**

**H. ICEK BASKORO, SH.
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
TAHUN 2012
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik, di samping aspiratif juga perlu mengembangkan dan menerapkan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Sesuai amanat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang memuat :

- A. Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
- B. Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi; dan
- C. Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Informasi LPPD ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2012, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan saran itu disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan.

A. DASAR HUKUM

- 1.** Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2.** Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
- 3.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Grobogan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di bagian timur Wilayah Provinsi Jawa Tengah, secara administrasi terbagi dalam 19 Kecamatan, 273 Desa dan 7 Kelurahan. Wilayah Kabupaten Grobogan terletak diantara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30'LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Semarang dan Demak.
- Sebelah Utara : Kabupaten Kudus, Pati dan Blora.
- Sebelah Timur : Kabupaten Blora.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Ngawi, Sragen, Boyolali, dan Semarang

Dengan luas wilayah kurang lebih 1.975,86 Km², Kabupaten Grobogan menjadi Kabupaten yang memiliki wilayah terluas ke-2 se-Provinsi Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap, dengan ibukota kabupaten berada di Kecamatan Purwodadi.

2. Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil registrasi, jumlah penduduk Kabupaten Grobogan pada Tahun 2012 tercatat sebanyak 1.433.361 jiwa. Jika dibandingkan dengan kondisi akhir tahun 2011 yang tercatat 1.423.261 jiwa, maka terdapat penambahan penduduk sebanyak 10.100 jiwa atau mengalami pertumbuhan 0,7%.

Pertumbuhan tersebut berdampak pada meningkatnya angka kepadatan penduduk Kabupaten Grobogan yang mencapai 725 jiwa/km², lebih tinggi dari tahun 2011 yang hanya 719 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Purwodadi sebesar 1.715 jiwa/km², sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Kedungjati sebesar 340 jiwa/km².

Dilihat dari komposisi menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki tercatat sebanyak 711.626 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 721.735 jiwa. Dengan demikian sex ratio penduduk mencapai 98%, yang berarti bahwa setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 98 jiwa penduduk laki-laki.

Sementara ditinjau dari jumlah penduduk berdasarkan usia, rasio ketergantungan penduduk sebesar 46,1%, artinya setiap 100 penduduk berusia produktif di Kabupaten Grobogan menanggung 46 orang yang belum atau tidak produktif, angka ketergantungan sebesar 46 ini masuk dalam kategori **ketergantungan rendah**.

Adapun jumlah penduduk miskin selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 19,84% pada tahun 2008, berurutan mengalami penurunan menjadi 18,68%, 17,86% dan 17,38% pada tahun 2011 atau 247.363 jiwa.

Dilihat dari komposisi tingkat pendidikan penduduk usia 5 tahun keatas, tamatan SD sederajat menduduki peringkat yang tertinggi yaitu 38,55%, tidak atau belum pernah sekolah dan tidak atau belum tamat SD

sebanyak 32,21%, tamatan SLTP sederajat sebesar 17,50%, tamatan SMU sederajat 9,64%, sedangkan Diploma, S1, S2 dan S3 sebesar 2,10%.

Selanjutnya dari Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Grobogan selama empat tahun terakhir masuk dalam kategori kelas menengah atas dan selalu mengalami kenaikan yaitu mulai dari 70,22 dan terakhir pada tahun 2011 sebesar 71,27.

3. Kondisi Ekonomi

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan, dimana Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan Tahun 2012 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,05%.

Jika dilihat dari pertumbuhan PDRB perkapita, pada tahun 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, yaitu atas dasar Harga Konstan naik 5,4%, sedangkan atas dasar Harga Berlaku naik sebesar 13,2%.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, pada umumnya dapat dilihat dari indikator **Indeks Gini Ratio** dan **Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah** sesuai Kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan kedua indikator distribusi pendapatan masyarakat tersebut, Kabupaten Grobogan selama lima tahun terakhir selalu masuk dalam kategori **ketimpangan rendah**. Hal ini dibuktikan dengan nilai Indeks Gini Ratio dari tahun 2008 sampai tahun 2011 selalu di bawah batas indeks yang ditetapkan yaitu dibawah angka 0,35.

Demikian juga dilihat dari indikator Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah, di mana selama lima tahun terakhir selalu jauh di atas batas ketimpangan yaitu di atas angka 17%.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2016, telah ditetapkan visi pembangunan jangka menengah untuk 5 tahun adalah **“Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi dimaksud, maka disusunlah misi daerah sebagai rumusan umum tindakan kongkret yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. PRIORITAS DAERAH

Sesuai visi misi tersebut, maka setiap tahun ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rancangan kerja dan pendanaannya.

Selanjutnya RKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan APBD, sehingga dengan demikian terdapat keterkaitan antara program dan kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam RKPD tahun 2012 sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 35 tahun 2011, telah ditetapkan Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Grobogan, sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana dan prasarana umum daerah.
2. Pembangunan di bidang pendidikan.
3. Pembangunan di bidang kesehatan.
4. Pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Percepatan penanggulangan kemiskinan.
6. Perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.
7. Penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance*.

III. KEUANGAN DAERAH

APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2012 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan secara teknis didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012.

Selanjutnya dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin,

Transparansi, serta Akuntabilitas. APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011, sedangkan perubahan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012.

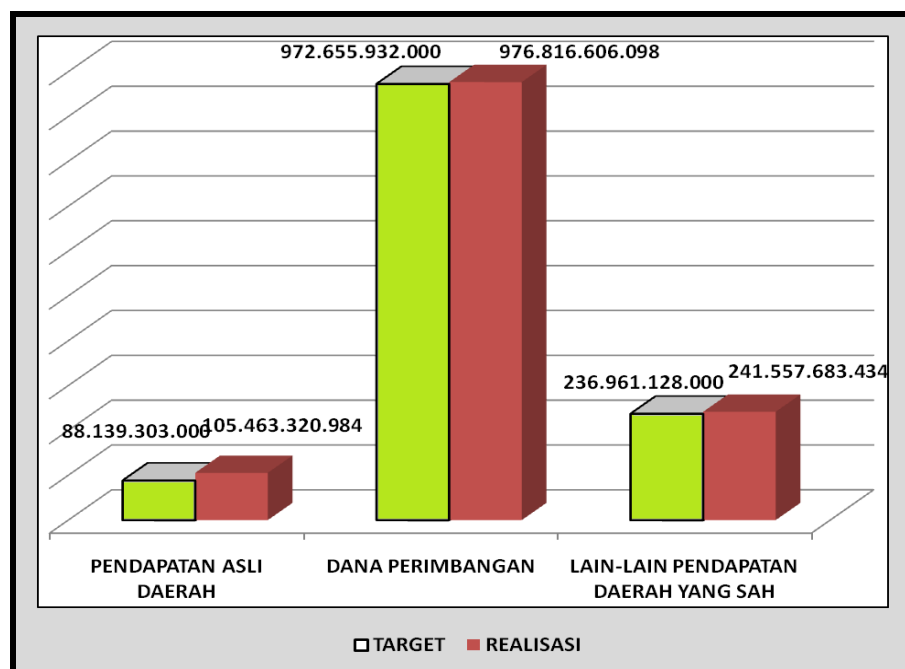
Selanjutnya, secara ringkas disampaikan realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun perlu diketahui bahwa angka realisasi APBD yang disampaikan ini masih bersifat sementara, karena belum selesai diaudit oleh BPK RI.

A. PENDAPATAN DAERAH

Target Pendapatan Kabupaten Grobogan tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.297.756.363.000,- dan terealisasi Rp.1.323.837.610.516,- atau 102,01% dengan perincian :

1. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.88.139.303.000,- terealisasi Rp.105.463.320.984,- atau 119,66%;
2. Target Dana Perimbangan sebesar Rp.972.655.932.000,- terealisasi Rp.976.816.606.098,- atau 100,43%; dan
3. Target Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.236.961.128.000,- terealisasi Rp.241.557.683.434,- atau 101,94%.

Target dan realisasi Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 1
Perbandingan Target dan Realisasi Pendapatan Daerah tahun 2012

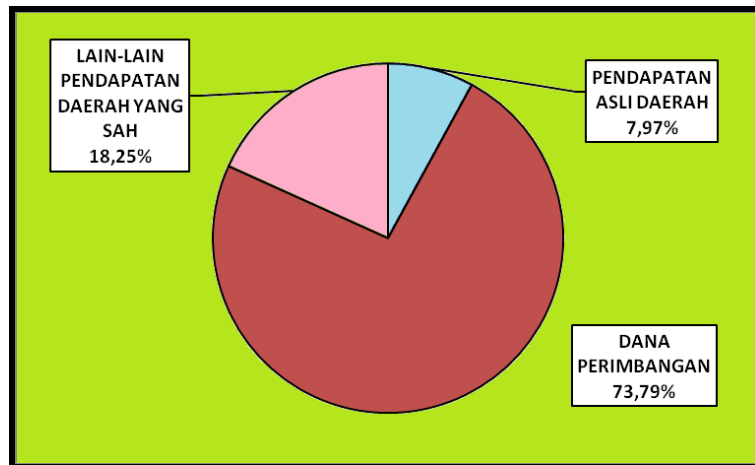
Adapun secara rinci target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan APBD Kabupaten Grobogan
Tahun Anggaran 2012

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	%
	PENDAPATAN	1.297.756.363.000	1.323.837.610.516	102,01
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.139.303.000	105.463.320.984	119,66
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.989.665.000	18.690.718.677	124,69
2	Pendapatan Retribusi Daerah	14.328.531.000	15.134.904.001	105,63
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.720.409.000	6.712.724.685	99,89
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.100.698.000	64.924.973.621	124,61
B	DANA PERIMBANGAN	972.655.932.000	976.816.606.098	100,43
1	Dana Bagi Hasil Pajak	61.167.571.000	64.904.651.232	106,11
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	1.442.601.000	1.866.194.866	129,36
3	Dana Alokasi Umum	812.990.740.000	812.990.740.000	100,00
4	Dana Alokasi Khusus	97.055.020.000	97.055.020.000	100,00
C	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	236.961.128.000	241.557.683.434	101,94
1	Pendapatan Hibah	1.050.500.000	709.703.500	67,56
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	57.314.523.000	63.125.944.934	110,14
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	131.494.643.000	131.494.643.000	100,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	47.101.462.000	46.227.392.000	98,14

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah berasal dari Dana Perimbangan sebesar 73,8% dari total Pendapatan Daerah. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain pendapatan yang sah sebesar 18,3% dan 7,9%. komposisi penyumbang pendapatan Daerah ini, lebih jelas dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



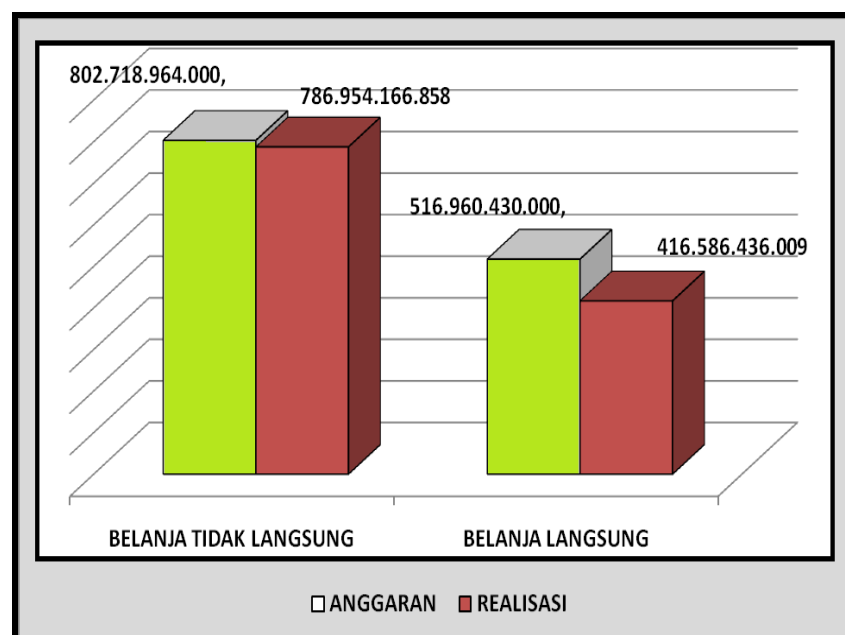
Gambar 2
Komposisi Penyumbang Pendapatan Daerah tahun 2012

B. BELANJA DAERAH

Target belanja Kabupaten Grobogan tahun 2012 adalah sebesar Rp.1.319.679.394.000,- dan realisasinya Rp.1.203.540.602.867,- atau 91,20% dengan perincian :

1. Target Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.802.718.964.000,-, realisasi sebesar Rp.786.954.166.858,- atau 98,04%; dan
2. Target Belanja Langsung sebesar Rp. 516.960.430.000,- terealisasi sebesar Rp. 416.586.436.009,- atau 80,58%.

Serapan Belanja Daerah dimaksud dapat dilihat dalam Grafik sebagai berikut :



Gambar 3
Perbandingan Target Dan Realisasi Belanja Daerah tahun 2012

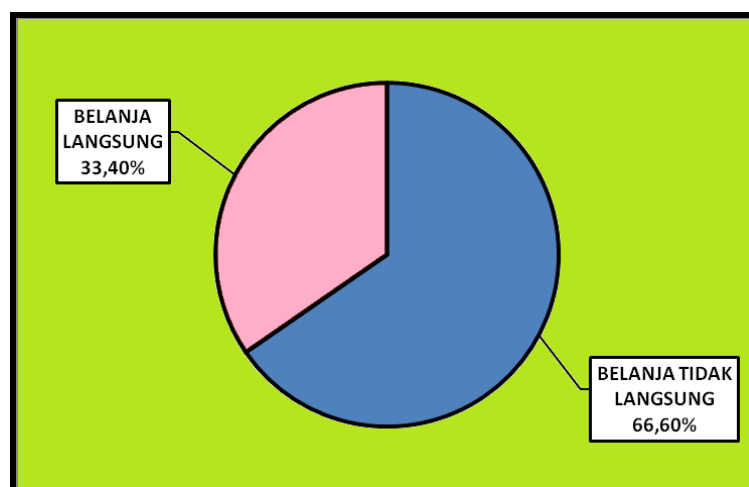
Adapun secara rinci target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2012, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2012

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	BELANJA	1.319.679.394.000,00	1.203.540.602.867	91,20
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	802.718.964.000,00	786.954.166.858	98,04
1	Belanja Pegawai	723.589.312.000,00	713.945.515.724	98,67
2	Belanja Bunga	47.179.000,00	47.178.063	100,00
3	Belanja Subsidi	300.000.000,00	300.000.000	100,00
4	Belanja Hibah	31.958.498.000,00	29.530.353.825	92,40
5	Belanja Bantuan Sosial	13.103.880.000,00	12.746.595.330	97,27
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.350.000.000,00	1.349.400.000	99,96
7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kab/Kota Pemerintahan Desa	30.316.150.000,00	28.544.692.366	94,16
8	Belanja Tidak Terduga	2.053.945.000,00	490.431.550	23,88
B	BELANJA LANGSUNG	516.960.430.000,00	416.586.436.009	80,58
1	Belanja Pegawai	38.937.245.071,12	35.955.786.682	92,34
2	Belanja Barang dan Jasa	203.134.647.048,88	190.555.668.746	93,81
3	Belanja Modal	274.888.537.880,00	190.074.980.581	69,15

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan. (angka sementara, belum diaudit BPK)

Sedangkan Komposisi serapan belanja daerah tersebut terdiri dari belanja tidak langsung sebesar 66,6% dan belanja langsung 33,4%, dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 4
Komposisi Belanja Daerah Tahun 2012

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp.37.346.712.765,- atau 85% dari target penerimaan. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai Rp.18.508.537.580,- atau 93% dari target pengeluaran.

Dari perhitungan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada tahun 2012, terdapat surplus selisih antara pendapatan dan belanja daerah sebesar Rp.120.297.007.649,- serta surplus pembiayaan daerah sebesar Rp.18.838.175.185,- sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2012 sebesar Rp.139.135.182.834,-.

Realisasi pembiayaan tahun 2012 dapat dilihat dalam tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Pembiayaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2012

NO	URAIAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	PENDAPATAN	1.297.756.363.000	1.323.837.610.516	102,01
2	BELANJA	1.319.679.394.000	1.203.540.602.867	91,20
	surplus/defisit	(21.923.031.000)	120.297.007.649	
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	40.605.847.000	37.346.712.765	91,97
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.682.816.000	18.508.537.580	99,07
	Pembiayaan Netto	21.923.031.000	18.838.175.185	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	139.135.182.834	

Sumber : DPPKAD Kabupaten Grobogan.(angka sementara, belum diaudit BPK)

IV. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan pada tahun 2012, Kabupaten Grobogan melaksanakan 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, dengan total anggaran sebesar Rp.516.960.430.000,- terealisasi 80,6%.

Untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2012, akan dipaparkan secara singkat sebagai berikut :

A. PRIORITAS PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM DAERAH

Usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana umum daerah, dilakukan melalui beberapa urusan pemerintahan antara lain urusan Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan dan Perumahan, dengan anggaran Rp.141.549.000.500,- terserap mencapai 90,2%.

Adapun prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan

Upaya perbaikan kondisi prasarana umum jalan, dapat dilihat dari bertambahnya ruas jalan Kondisi Mantap dan berkurangnya kondisi rusak dibanding dengan kondisi tahun sebelumnya. Pada tahun 2012 kondisi jalan rusak berat berkurang 0,98%, kondisi jalan rusak 4,3%, dan beralihnya kondisi sedang menjadi mantap 10,9% serta bertambahnya jalan kondisi mantap 11,8%.

Secara keseluruhan Program ini dilaksanakan melalui 370 paket peningkatan jalan meliputi 71 paket Kontruksi paving block, 177 paket Beton setapak, 19 paket Beton Full Rigid, 21 paket ATB dan 82 paket Telford.

2. Program Pemeliharaan jalan dan jembatan

Program ini dilaksanakan melalui 29 paket pemeliharaan jalan dan jembatan, yang terdiri dari 1 paket Beton Full Rigid, 2 paket telford, 2 paket ATB, 4 paket pemeliharaan Trotoar, 2 paket pengecatan kanstin trotoar dan 18 paket rehab jembatan.

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Program ini dilaksanakan melalui 113 paket jaringan pengairan, dengan realisasi kegiatan berupa 11 paket perbaikan talud, 33 paket pembangunan drainase, 2 paket perbaikan longsor, 18 paket perbaikan drainase dan 49 paket normalisasi saluran.

4. Program Pengendalian Banjir

Program ini dilaksanakan melalui 133 paket, dengan realisasi berupa 65 paket Rehab saluran sekunder, 2 paket rehab saluran tersier, 3 paket pembuatan embung, 42 paket normalisasi avour dan 15 paket perbaikan bendung serta 6 paket rehab talud.

B. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG PENDIDIKAN

Tantangan pembangunan pendidikan pada tahun mendatang semakin tinggi, mengingat begitu besar peranan pendidikan dalam membentuk sumber daya manusia yang handal. Kemajuan di bidang pendidikan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dengan capaian kinerja 38,66%, mengalami peningkatan 0,21% dibandingkan tahun 2011.
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD sederajat, dengan capaian kinerja 95,09%.
3. Angka Partisipasi Murni (APM) SLTP sederajat, dengan capaian kinerja 90,59%, meningkat 18,48%.
4. Angka Partisipasi Murni (APM)) SLTA sederajat, dengan capaian kinerja 33,87%.
5. Guru dengan kualifikasi S1/D-IV, dengan capaian kinerja 75,83%, mengalami peningkatan 13,44% dibandingkan sebelumnya.

Dalam rangka memantapkan kualitas pendidikan tersebut, dilaksanakan melalui penyelenggaraan beberapa urusan pemerintahan antara lain urusan Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, dan Perpustakaan, dengan anggaran Rp.139.567.369.500,- terealisasi 46,9%.

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pembangunan dimaksud adalah Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Selain belanja langsung tersebut di atas, juga dialokasikan belanja tidak langsung berupa : Bantuan hibah kepada Organisasi Sosial Masyarakat bidang Pendidikan serta Bantuan Hibah Pendidikan dari Gubernur Jawa Tengah dengan anggaran Rp.14.369.970.000,- terealisasi 92,3%

C. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG KESEHATAN.

Kemajuan di bidang kesehatan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja kunci diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Cakupan komplikasi kebidanan dengan capaian kinerja 72,21%, kondisi ini mengalami peningkatan 11,25%.
2. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan capaian kinerja 98,47%, atau meningkat 0,6%.
3. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), dengan capaian kinerja 100%.
4. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, dengan capaian kinerja 100%.
5. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, dengan capaian kinerja 67%, meningkat 8,06%.

Dalam rangka memantapkan kesehatan masyarakat, dilaksanakan melalui penyelenggaraan urusan kesehatan, dengan anggaran Rp.82.184.442.000,- terealisasi 98,4%.

Adapun program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan bidang kesehatan di antaranya adalah Program Penyediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan, Upaya Kesehatan Masyarakat, Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Penduduk, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

Untuk mendukung program dimaksud, juga dialokasikan anggaran belanja tidak langsung yang bertujuan mendukung prioritas urusan Kesehatan melalui bantuan Hibah kepada RSI, Bantuan sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Fungsi Kesehatan, DAK Sanitasi beserta pendampingannya dengan anggaran Rp.1.877.541.000,- terealisasi 99,4%.

Selain program dan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga memperoleh dukungan dari pemerintah melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Kesehatan untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 30 Puskesmas dengan anggaran Rp.2.617.500.000,- terealisasi 98,08%.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI, MELALUI PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN DAN ANDALAN DI BERBAGAI BIDANG UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Di bidang ekonomi, urusan pemerintahan yang terkait dengan usaha peningkatan kesejahteraan masyarakat diupayakan seoptimal mungkin. Urusan pemerintahan dimaksud meliputi Urusan koperasi dan UKM, Industri, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Perhubungan, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, Penanaman Modal dan Perdagangan, dengan anggaran Rp.39.117.864.000,- terealisasi 94,1%.

Adapun untuk meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, ditempuh melalui prioritas-prioritas bidang sebagai berikut :

- 1.** Prioritas pembangunan bidang **Koperasi dan Usaha Kecil Menengah**, diselenggarakan melalui 8 program 52 kegiatan, dengan anggaran Rp. 2.735.000.000,- terealisasi 99,2%, diantaranya adalah Program Penciptaan Iklim KUMKM yang Kondusif, Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif KUMKM serta Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
- 2.** Prioritas pembangunan bidang **Perindustrian**, diselenggarakan melalui 8 program 25 kegiatan, dengan anggaran Rp.1.382.437.500,- terealisasi 89,7%, diantaranya adalah Program Peningkatan Kapasitas Iptek sistem Produksi, Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Pengembangan Industri Agro dan Kimia, serta Program Pengembangan Industri Tekstil Produk Tekstil.
- 3.** Prioritas pembangunan bidang **Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)**, diimplementasikan melalui 3 program 6 kegiatan, dengan anggaran Rp.2.230.000.000,- terealisasi 88,6%, meliputi Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Air Tanah.
- 4.** Prioritas pembangunan bidang **Pariwisata**, diimplementasikan melalui 3 program 11 kegiatan, dengan anggaran Rp.700.000.000,- terealisasi 98,2%, meliputi Program pengembangan dan pemasaran obyek wisata dan pengembangan destinasi pariwisata.

5. Prioritas pembangunan bidang **Perhubungan**, diselenggarakan melalui 8 program dan 37 kegiatan, dengan anggaran Rp.3.504.538.000,- terealisasi 90,8%, diantaranya adalah Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Peningkatan Pelayanan Angkutan dan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas.
6. Prioritas pembangunan bidang **Pertanian dan perkebunan**, diselenggarakan melalui 12 program 288 kegiatan dengan anggaran Rp.22.591.194.000,- terealisasi 95,4%, di antaranya adalah Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, Ketahanan Pangan, Pemasaran Hasil Produksi Pertanian dan Perkebunan, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak, Peningkatan Produksi Hasil Peternakan serta Peningkatan Permasarannya.
7. Prioritas pembangunan bidang **Perikanan**, di selenggarakan melalui 3 program 8 kegiatan, dengan anggaran Rp.2.097.570.000,- terealisasi 89,3%, meliputi Program Pengembangan Budidaya Perikanan dan Perikanan Tangkap serta Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.
8. Prioritas pembangunan bidang **Kehutanan**, diimplementasikan melalui 7 program dan 45 kegiatan, dengan anggaran Rp.2.714.562.000,- terealisasi 90,9%, diantaranya adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.
9. Prioritas pembangunan bidang **Penanaman Modal**, diselenggarakan melalui 2 program 3 kegiatan, dengan anggaran Rp.125.000.000,- terealisasi 78,5%, meliputi Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.
10. Prioritas pembangunan bidang **Perdagangan**, diselenggarakan melalui 5 program 6 kegiatan dengan anggaran Rp.1.037.562.500,- terealisasi 98,7%, diantaranya adalah Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pembinaan dan Pengawasan Pendirian Pasar / Toko

Modern, Pelayanan Perdagangan Berjangka Komoditi dan Program Penyediaan Jasa Kinerja Pasar Daerah.

E. PRIORITAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya pada gambaran umum daerah, bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Grobogan selama empat tahun terakhir selalu mengalami penurunan, mulai dari 19,84% pada tahun 2008 berurutan menjadi 18,68%, 17,86% dan 17,38% pada tahun 2011 atau 247.363 jiwa.

Untuk melaksanakan prioritas ini ditempuh melalui beberapa urusan pemerintahan antara lain Urusan Sosial, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, serta Ketransmigrasian, dengan anggaran Rp.14.932.151.500,- terserap 89,9%.

Selain program dan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun 2012, upaya program ini juga memperoleh dukungan dari pemerintah melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum yang digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di 16 desa/kelurahan Kecamatan Purwodadi dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 18 desa serta di beberapa kecamatan, dengan anggaran Rp.5.893.000.000,- terealisasi 100%.

Disamping itu juga mendapatkan Tugas pembantuan dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar di 18 kecamatan dengan anggaran Rp.34.911.357.000,- terealisasi 99,9%.

F. PRIORITAS PERLUASAN LAPANGAN KERJA UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN

Angkatan kerja di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2012 mencapai 778.813 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 47.241 jiwa dibandingkan tahun lalu. Sedangkan penduduk bekerja mencapai 745.068 jiwa, mengalami peningkatan sebesar 51.512 jiwa dibandingkan tahun lalu.

Angka pengangguran di Kabupaten Grobogan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 mengalami tren penurunan, dari 46.610 jiwa pada tahun 2009, 35.393 jiwa pada tahun 2010, 38.016 jiwa pada tahun 2011 dan pada

Tahun 2012 sebesar 33.723 jiwa. Demikian pula tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2012 sebesar 4,33; mengalami penurunan sebesar 0,87 dibandingkan tahun 2011. Dibandingkan tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 1,74.

Upaya Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan prioritas perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, diimplementasikan melalui Urusan Ketenagakerjaan, dengan anggaran Rp.1.359.163.000,- terserap 97,6%.

Adapun program yang ditempuh antara lain program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, Peningkatan Kesempatan Kerja, serta Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Selain program dan kegiatan yang dibiayai APBD Tahun Anggaran 2012, juga memperoleh dukungan melalui Tugas Pembantuan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang digunakan untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, dengan anggaran Rp.920.000.000,-, terealisasi 99,4%.

G. PRIORITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAH YANG EFEKTIF DAN EFISIEN SESUAI DENGAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*

Prioritas ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas kegiatan pembangunan, kualitas pelayanan perijinan dan kualitas aparatur pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut ditempuh melalui beberapa urusan dengan anggaran Rp.98.250.439.500,- yang terserap 92,7%. Adapun program yang dilaksanakan diantaranya adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan, dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur serta Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Di samping itu, untuk mendukung program dan kegiatan ini juga dialokasikan anggaran melalui bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

meliputi TPAPD dan TKAPD, Bantuan Desa Kurang Hasil, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, Stimulus Percepatan Pelunasan PBB Desa/Kelurahan, Bantuan Keuangan kepada RT dan RW, dengan anggaran sebesar Rp. 30.316.150.000,- atau 94,16%.

V. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pada Tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menerima beberapa Tugas Pembantuan dari Pemerintah melalui 6 (enam) Kementerian, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kehutanan, dengan total anggaran Rp.60.603.558.500,- terserap 99,7%.

Tugas Pembantuan dimaksud, terangkum dalam **urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketenagakerjaan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pertanian, Ketahanan pangan dan urusan Kehutanan**. Secara ringkas urusan dimaksud dapat disampaikan sebagai berikut :

- A.** Urusan **Kesehatan**, dari Kementerian Kesehatan dengan anggaran Rp.2.617.500.000,- terealisasi 98,1%, untuk kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan bagi 30 Puskesmas.
- B.** Urusan **Pekerjaan Umum**, dari Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp. 5.893.000.000,- terealisasi 100%, digunakan untuk Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan di 16 desa/kelurahan pada kecamatan Purwodadi serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat di 18 desa 13 kecamatan.
- C.** Urusan **Ketenagakerjaan**, dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan anggaran Rp.920.000.000,- terealisasi 99,4%, digunakan untuk Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja.
- D.** Urusan **Pemberdayaan Masyarakat Desa**, dari Kementerian Dalam Negeri dengan anggaran Rp.34.911.357.000,- terealisasi 99,9%, digunakan untuk Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan melalui kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar di 18 kecamatan.
- E.** Urusan **Pertanian**, dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp. 12.590.100.000,- terealisasi 99,4% digunakan untuk pelaksanaan

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

- F.** Urusan **Ketahanan Pangan**, dari Kementerian Pertanian dengan anggaran Rp.697.300.000,- terealisasi 90,8%, digunakan untuk program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
- G.** Urusan **Kehutanan**, dari Kementerian Kehutanan dengan anggaran Rp.2.974.301.500,- terealisasi 99,3%, digunakan untuk program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.

VI. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan, yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan pada Tahun 2012, antara lain sebagai berikut :

- A. Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah, berupa kerjasama antar regional di 6 (enam) wilayah yang terdiri dari Kabupaten Kendal, Grobogan, Demak, Semarang, Kota Semarang dan Kota Salatiga melalui Forum Kedungsepur.
- B. Kerjasama Bidang Transmigrasi dengan Pemerintah Daerah lokasi penerima antara lain Pemerintah Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- C. Koordinasi Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan Instansi Vertikal, dalam rangka mencapai keterpaduan, keselarasan dan keharmonisan untuk menciptakan terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Kegiatan ini ditempuh melalui Forum FKPD, kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) di 12 desa, Pembinaan Pedagang Kaki Lima, Koordinasi pendidikan politik, penyelenggaraan Pemilihan Kepala desa, penyelenggaraan Ibadah Haji, dan lain-lain.
- D. Terkait dengan pembinaan batas wilayah, Pemerintah Kabupaten Grobogan tahun ini menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai

Batas Daerah Kabupaten Grobogan dengan Kabupaten tetangga khususnya Kabupaten Pati, Blora dan Kudus.

- E. Dalam Pencegahan dan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten Grobogan telah melaksanakan pemantauan dan penyebarluasan informasi pemetaan potensi bencana alam, penyediaan bahan bantuan bencana alam, melaksanakan sosialisasi penanggulangan bencana, mengoptimalkan peran satgas penanggulangan bencana alam, pembangunan talud-talud penahan tanah di wilayah bahaya tanah longsor, normalisasi saluran dan perbaikan tanggul-tanggul penahan banjir, rehabilitasi hutan dan lain-lain.
- F. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum telah dilakukan upaya-upaya kondusif, melalui koordinasi dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI dan unsur masyarakat.
- G. Hal Lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2012, sebagai berikut :

1. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil;
2. Penghargaan Nasional sebagai Pelaksana Terbaik Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA);
3. Penghargaan Nasional Transmigration Award 2012;
4. Juara I Tingkat Nasional Penanaman Satu Milyar Pohon;
5. Penghargaan Nasional tingkat madya Anugrah Parahita Eka Praya bidang penerapan strategi pengarusutamaan gender;
6. Serta beberapa prestasi tingkat regional lainnya.

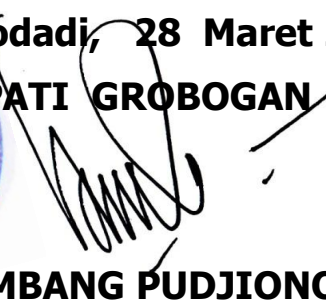
VII. PENUTUP

Pada akhir penyampaian ILPPD ini, izinkanlah saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, yang telah bersama-sama dengan segenap tenaga, pikiran, dan kerjasamanya dalam kegiatan pembangunan daerah, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum selalu dalam keadaan baik dan kondusif.

Selanjutnya saya menyadari, bahwa pelaksanaan pembangunan saat ini belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat dan menyelesaikan

semua persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena saya tidak mau atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, dengan masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera. Amin.

 **Purwodadi, 28 Maret 2013**
BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH